BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gerakan reformasi nasional telah merubah kebijaksanaan pembangunan menjadi lebih demokratis, mengakui persamaan derajat manusia dan desentralisasi pembangunan. Namun, reformasi menyisakan sejumlah isu serta masalah pendidikan nasional, baik yang bersifat mikro maupun makro. Masalah kualitas dan relevansi merupakan isu pada level mikro. Masalah persamaan, desentralisasi dan manajemen pendidikan merupakan isu pada level makro. Untuk itu, strategi pemberdayaan individu dan masyarakat mutlak diperlukan. Dalam hal ini, pendidikan diyakini merupakan faktor yang paling berperan bagi upaya pemberdayaan individu dan masyarakat itu sendiri.

Kondisi sosial masyarakat yang terkover dalam bingkai negara seperti Indonesia tentu tidak terlepas dari setiap kebijakan politik yang ditetapkan. Di sinilah urgensi dari kajian terkait politik dan kebijakan, khususnya yang mengakomodir pelaksanaan proses pendidikan Islam, menjadi poin penting yang dapat menjadi fondasi bagi berlangsungnya sebuah sistem pendidikan. Sehingga dapat diartikan bahwa kebijakan adalah sebuah efisiensi dan keakuratan dalam penggunaan sumberdaya, baik berbentuk sumberdaya alam atau sumberdaya manusia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat ataupun pemerintah itu sendiri.[2]

---

[2] Yeremias Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik* (Yogyakarta: Gama Media, 2008), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pendapat Peterson, kebijakan secara umum dilihat sebagai aksi pemerintah dalam menghadapi masalah, dengan mengarahkan perhatian terhadap kekuasaan.[3] Dari pendapat ini, Peterson menggambarkan bahwa kebijakan itu bukanlah sebuah proses yang lurus dalam artian mudah atau tidak. Namun, kompleksitas persoalan banyak timbul dalam proses pembuatan kebijakan publik dari pada masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Karena di dalam kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh siapa yang membuat dan akan memperoleh apa, kapan ketepatan pelaksanaan dan pembuatannya serta bagaimana pembuatan kebijakan itu sendiri.

Kajian kebijakan dan politik (pendidikan) merupakan landasan konsep keilmuan dalam bidang administrasi pendidikan yang harus dipahami secara komprehensif oleh setiap tenaga pendidik dan kependidikan. Kebijakan dan politik pendidikan menekankan pada pengembangan sumberdaya manusia yang menjadi pusat perhatian semua sektor dan subsektor pembangunan nasional. Di mana itu semua menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekuatan untuk mencapai keunggulan dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar memiliki tempat yang sejajar dengan negara-negara lain di dunia.

Pemerintah sendiri menyadari peran mutu sumberdaya manusia dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu faktor pengaturan dalam mencapai keunggulan. Berbagai kebijakan pendidikan digulirkan seiring dengan banyaknya kepentingan-kepentingan politik yang mendorong maupun menghambat kelancaran implementasi kebijakan dalam bidang pendidikan. Di

[3]Yeremias Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik* (Yogyakarta: Gama Media, 2008), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara kebijakan tersebut meliputi *equity* dan *equality of education*, perubahan kebijakan undang-undang pendidikan ke arah desentralisasi pendidikan, dan kepemimpinan pendidikan dalam menyongsong *quality of life.*

Realitas pendidikan di lapangan selalu memiliki penjelasan tersendiri, ia memiliki daya dan ruang kekuasaan. Pendidikan memiliki ruang untuk melakukan kritik atas kekuasaan yang tidak sesuai dengan rel pendidikan, dan kuasa (pembuat kebijakan) harus membuka pandangan bahwa politik itu sebagai suatu seni yang memungkinkan sesuatu untuk terealisasi.

Sudah sekian waktu pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan dalam sistem kebijakan di bidang pendidikan, baik kebijakan sentralistik menuju desentralistik atau juga sebaliknya. Hal yang berkenaan dengan perubahan kebijakan tentu akan mempengaruhi pula terhadap pengelolaan pendidikan. Tercatat di Indonesia pernah menganut pengelolaan sentralistik, dengan konsekuensi segala sesuatunya ditentukan oleh pemerintah pusat, dari perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi seluruhnya ada di tangan pemerintah pusat.

Namun, ada asumsi bahwa penerapan pola sentralistik telah membuat roda pemerintahan dan pembangunan berjalan tidak efektif, efisien, rawan kebocoran. Sehingga dapat menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan regional, yang memaksa keseragaman, mematikan potensi dan karakteristik daerah, menyulitkan *quality control* (pengawasan mutu) dan *quality assurance* (jaminan mutu), mematikan kreativitas pemerintah daerah, serta menghambat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

partisipasi masyarakat.[4] Sementara, kebijakan desentralisasi yang secara definisi dipahami sebagai penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[5] Dengan desentralisasi, kebijakan-kebijakan pendidikan baru banyak bermunculan seiring dengan nilai-nilai adi luhur yang sudah mengakar kuat pada daerah tertentu.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas berpenduduk Islam, pada tingkatan daerah-daerah tertentu memiliki sosok yang akrab disebut kiai, selaku pemimpin tertinggi di lembaga pendidikan Islam yang disebut pesantren. Eksistensi seorang kiai dalam sebuah pesantren menempati posisi yang sentral. Kiai merupakan titik pusat bagi pergerakan sebuah pesantren serta menjadi sumber inspirasi dan sumber pengetahuan bagi santrinya secara absolut.

Seringkali dalam sebuah pesantren, sosok kiai merupakan perintis, pengelola, pemimpin, pengasuh bahkan sebagai pemilik tunggal. Sehingga kepemimpinan seorang kiai terlihat otoriter.[6] Terbentur dengan itu maka orang-orang di luar pesantren akan sulit sekali menembus dunia pesantren.

Kiai bebas menentukan format pesantrennya sesuai dengan format yang diinginkan, tanpa campur tangan siapapun, walaupun format itu sendiri sangat dipengaruhi oleh gaya dan kemampuan kiai tersebut, hal itulah yang akhirnya mejadikan ciri khas dari sebuah pesantren.

---

[4] M. Sirozi, *Politik Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 229-230.
[5] UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1.
[6] Yasmadi, *Modernisasi Pesantren: Kritik Nur Cholis Majid Terhadap Pendidikan Islam Tradisonal* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi seorang santri, peran kiai yang paling besar adalah sebagai guru dan suri teladan bagi santrinya, serta sebagai tokoh ideal bagi komunitas santri.[7] Seluruh waktu kiai habis untuk mengajar santrinya. Seorang kiai juga menjadi model bagi santrinya, sehingga seorang kiai harus selalu menjaga citranya, jangan sampai melakukan perbuatan yang melanggar syari'at Islam.

Dalam pandangan Tolhah Hasan, peran kiai secara sosiologis adalah sebagai pemimpin. Di mana kepemimpinan kiai dibagi menjadi empat dimensi diantaranya: *Pertama,* kepemimpinan ilmiah, di mana seorang kiai dipandang mempunyai kecerdasan dan pengetahuan di atas rata-rata masyarakat pada umumnya. *Kedua,* kepemimpinan spiritual, seorang kiai membimbing masyarakat dan santri melalui tasawuf dan tarekat. *Ketiga,* kepemimpinan sosial, seorang kiai menjadi tokoh masyarakat. *Keempat,* kepemimpinan administratif, dimana seorang kiai memimpin sebuah institusi seperti pesantren dan organisasi yang lain.[8] Sedangkan pandangan Zamakhsyari Dhofier, konsistensi kiai atau pengasuh pondok pesantren, untuk mempertahankan serta menyebarkan Islam, telah berimplikasi pula terhadap lambannya pesantren mengadakan pembaharuan dan perubahan.[9] atau bisa disebut dengan modernisasi pendidikan.

Di sinilah seorang pengasuh pondok pesantren mempunyai peran yang sentral dan fenomenal dalam menentukan arah kebijakan pendidikan yang nantinya diterapkan, setidaknya di pondok pesantrennya sendiri. Apakah pondok

---

[7] Ridlwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 23.

[8] Yasmadi, *Modernisasi Pesantren: Kritik Nur Cholis Majid Terhadap Pendidikan Islam Tradisonal* (Jakarta: Ciputat Press, 2002). 63.

[9] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pesantren akan berusaha tetap bertahan dalam ketradisionalannya serta membentengi diri dari gelombang modernisasi pendidikan. Ataupun pondok pesantren akan bersikap terbuka saat berhadapan dengan budaya-budaya baru di luar dunia mereka dengan tidak menanggalkan sama sekali pakaiannya yang eksklusif, tradisi pesantren dan Islam.

Di Bangkalan masyarakat mempunyai anggapan di mana sosok kiai memiliki pengaruh yang besar di dalam tatanan sosial masyarakat. Pengaruh tersebut muncul dari kharisma yang dimiliki seorang kiai dalam peranannya yang tidak hanya memberikan bimbingan terhadap para santri, namun juga menjadi filter yang menyaring budaya luar yang masuk. Selain itu, peran kiai juga melakukan perubahan sosial baik, di lingkungan pesantren maupun masyarakat sekitar. Dalam kondisi seperti itulah sosok kiai memiliki fungsi sebagai *cultural brokers* (agen budaya) di tatanan sosial yang ada.[10]

Dalam tatanan masyarakat, kiai digolongkan dalam kelompok elit, yang mana memiliki pengaruh kekuasaan ditingkat lokal baik secara formal maupun non-formal. Dikatakan formal jika kiai menduduki posisi jabatan secara administratif seperti jabatan eksekutif dan legislatif. Contoh konkrit kiai menduduki jabatan formal ketika Kiai Fuad Amin menjabat sebagai bupati di Kabupaten Bangkalan. Bila non-formal, kiai hanya menduduki jabatan strategis yang memiliki pengaruh langsung ke masyarakat seperti organisasi keagamaan atau kemasyarakatan. Jadi, kiai menempati segala kedudukan yang memiliki legitimasi secara formal maupun non-formal.

---

[10] Miftah Faridl, "Peran Sosial Politik Kyai di Indonesia" *Jurnal Sosioteknologi* Edisi xi, 6 Agustus 2007), 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum, figur kiai hanya sebatas pada perannya yang dijadikan rujukan setiap persoalan agama yang muncul. Namun tidak menafikan kiai untuk tampil dalam dunia politik. Karena secara teologi Islam sebagai landasan dalam menjalani kehidupan di semua bidang. Walaupun al-Qur'an hanya menggambarkan urusan politik secara universal tapi eksistensinya ada ketika Nabi Muhammad S.A.W mempraktekannya sebagai pemimpin di Madinah. Tentunya gambaran ini menjadikan kiai untuk ikut andil dalam dimensi kebijakan-kebijakan khususnya yang berkaitan erat dengan hajat berjalannya dunia pendidikan secara luas.

Sebagaimana diketahui, bahwa kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam kurun waktu tertentu. Di mana terdapat kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah di antaranya kebijakan yang diturunkan pada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang biasanya digunakan sebagai arah atau pedoman pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan suatu program kerja ataupun mengatasi permasalahan tidak terkecuali yang secara khusus mengenai kebijakan pendidikan.

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang kebijakan di antaranya: Menurut Ealau dan Pewitt, bahwa kebijakan merupakan sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut.[11] Sedangkan Titmuss mendefinisikan, kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan

[11] Ealau dan Pewitt, *Kebijakan Publik* (Jakarta: Handal Niaga Pustaka, 2007), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diarahkan pada tujuan tertentu.[12] Sementara Edi Suharto mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.[13]

Dalam konteks penyusunan perencanaan kebijakan pendidikan, termasuk dalam perencanaan pendidikan di daerah kabupaten/kota, diperlukan koordinasi antar instansi Pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan serta masyarakat melalui suatu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten serta forum Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pada regulasi inilah sosok kiai yang notabene seorang yang sangat dihormati dalam kultur masyarakat Madura, berpartisipasi serta ikut andil dalam penentuan kebijakan pendidikan di setiap kesempatan tersebut.

Dalam melakukan perencanaan pendidikan kabupaten/kota, pertama-tama perlu dilakukan analisis lingkungan strategis, untuk mengetahui lingkungan eksternal yang berpengaruh terhadap perencanaan pendidikan kabupaten/kota. Selain itu, berbagai perubahan lingkungan strategis harus diakomodasi serta diinternalisasikan ke dalam perencanaan pendidikan kabupaten/kota agar perencanaan tersebut benar-benar menyatu dengan perubahan lingkungan strategis tersebut. Kemudian, perlu analisis situasi untuk mengetahui ”situasi pendidikan saat ini” dan ”situasi pendidikan yang diharapkan atau ditargetkan” menyangkut berbagai kebijakan pendidikan yang ditetapkan, sehingga kesenjangan dapat

[12] Titmuss, *Social Policy* (Jakarta: Handal Niaga Pustaka, 1974), 32.
[13] Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui melalui kebijakan *substantif*, *implementatif*, program serta rencana kegiatan yang dapat dipikirkan secara *integrated*.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan mendasar yang diuraikan di atas, menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang partisipasi kiai pesantren dalam penentuan kebijakan pendidikan di Bangkalan. Sehingga memunculkan beberapa pertanyaan yang menjadi sebuah kegelisahan akademik penulis diantaranya: Bagaimana relasi kuasa kiai pesantren dan pejabat publik di Bangkalan? Bagaimana bentuk partisipasi kiai pesantren dalam penentuan kebijakan pendidikan? Bagaimana bentuk kebijakannya? Bagaimana partisipasi kiai dalam mempengaruhi kebijakan pendidikan di Bangkalan? Apa motif partisipasi kiai pesantren dalam penentuan kebijakan pendidikan? Serta bagimana implikasi dari kebijakan tersebut terhadap pendidikan Islam di Bangkalan?.

Dari beberapa pertanyaan di atas, kemudian penulis sederhanakan dalam rumusan masalah. Sedangkan ruang lingkup penelitian ini dibatasi partisipasi kiai pesantren[14] yang mempunyai otoritas kepemimpinan. Penelitian ini tidak melihat elit politik dalam merebut kekuasaan sebagai objek penelitian. Tetapi bagaimana kiai pesantren berpartisipasi langsung dalam penentuan kebijakan pendidikan, Sehingga kiai sebagai pengasuh pesantren bisa berpartisipasi aktif dalam penentuan kebijakan pendidikan. Serta memahami implikasi dari partisipasi kiai

[14] Kiai juga disebut sebagai "elit agama". Istilah elit berasal dari bahasa Inggris "*elite*" yang juga berasal dari bahasa Latin "*eligere*", yang berarti memilih. Istilah elit digunakan pada abad ke tujuh belas, untuk menyebut barang-barang dagangan yang mempunyai keutamaan khusus, yang kemudian digunakan juga untuk menyebut kelompok-kelompok sosial tinggi seperti kesatuan-kesatuan militer atau kalangan bangsawan atas**.** Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia,1994), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pesantren dalam penentuan kebijakan pendidikan terhadap perkembangan pendidikan Islam di Bangkalan, obyek kiai dalam penelitian ini dibatasi pengasuh pesantren yang berpartisipasi dalam penentuan kebijakan pendidikan di Bangkalan.

Dalam penelitian ini perlu ditentukan batasan masalahnya agar fokus dan tidak bias pada hal-hal yang tidak memiliki relevansi. Penelitian ini terbatas pada masalah relasi kuasa kiai pesanteren dan pejabat publik, partisipasi kiai pesantren dalam penentuan kebijakan pendidikan, serta implikasi dari adanya partisipasi kiai pesantren dalam penentuan kebijakan di Bangkalan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana bentuk relasi kuasa kiai pesantren dan pejabat publik di Bangkalan ?
2. Bagaimana bentuk partisipasi kiai pesantren dalam penentuan kebijakan pendidikan di Bangkalan ?
3. Bagaimana implikasi partisipasi kiai pesantren dalam penentuan kebijakan pendidikan terhadap pendidikan Islam di Bangkalan ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menjelaskan/mengeksplanasi serta menganalisis secara mendalam tentang:

1. Bentuk relasi kuasa kiai pesantren dan pejabat publik di Bangkalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bentuk partisipasi kiai pesantren dalam penentuan kebijakan pendidikan di Bangkalan.
3. Implikasi partisipasi kiai pesantren dalam penentuan kebijakan pendidikan terhadap pendidikan Islam di Bangkalan.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mengarah pada hal yang sifatnya mendasar sebagai wahana pengembangan dan pendalaman pengetahuan pendidikan baik bagi peneliti maupun bagi masyarakat umum yang kemudian bisa membentuk pola pikir terbuka dan bernilai. Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat atau nilai guna secara teoritis dan praktis.

Secara teoritis akademis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, pengkaya khazanah ilmiah dan nilai-nilai pendidikan Islam di Indonesia. Sedangkan secara praktis diharapkan juga berguna bagi insan akademis, karya ilmiah/pengembangan dunia literasi dan pertimbangan analisis wacana terkhusus pendidikan Islam, Serta bermanfaat bagi pesantren dan perkembangan pendididikan Islam ke depan.

F. Kerangka Teoretik

Sebagai pisau analisis penelitian, sekaligus untuk menjelaskan masalah utama terkait partisipasi kiai pesantren dalam penentuan kebijakan di Bangkalan, penelitian ini menggunakan beberapa teori yang diantaranya: Teori hegemoni, teori kekuasaan, dan teori kebijakan publik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Teori Hegemoni

Teori hegemoni dalam penelitian ini dapat dikaitkan langsung dengan pemikiran Antonio Gramsci.[15] Gramsci, mengemukakan hegemoni merupakan "sebuah pandangan hidup dan cara berpikir yang dominan", yang di dalamnya berisi sebuah konsep tentang kenyataan yang disebarluaskan dalam masyarakat baik secara institusional maupun perorangan yang mencontohkan seluruh cita rasa, kebiasaan moral, prinsip-prinsip religius dan politik serta seluruh hubungan-hubungan sosial, khususnya dalam makna intelektual dan moral.

Pandangan Gramsci, bahwa hegemoni bekerja dengan dua tahap yaitu: tahap dominasi dan tahap pengarahan atau kepemimpinan intelektual dan moral. Tahap dominasi yang paling sering dilakukan oleh negara melalui institusi-institusi kekuasaan seperti sekolah, universitas, modal, media dan lembaga-lembaga negara lainnya. Ideologi yang disusupkan lewat alat-alat tadi bagi Gramsci merupakan kesadaran yang bertujuan agar ide-ide yang diinginkan negara menjadi norma yang disepakati oleh masyarakat. Gramsci memandang bahwa dominasi merupakan awal hegemoni. Jika sudah melalui tahapan dominasi ini, maka tahap berikutnya tinggal mengarahkan sebuah bentuk ketundukan kelas yang didominasi pada kelas yang mendominasi. Siapa yang mencoba melawan hegemoni dianggap orang yang tidak taat terhadap aturan, moral serta konsensus. Bahkan mungkin saja dianggap dari penyelewengan dan pembangkangan.[16]

---

[15] Antonio Gramsci merupakan salah satu pemikir filsafat sosiologis politik yang mempelopori ide dan gagasan tentang hegemoni, kekuasaan dan negara dalam studi ilmu politik kontemporer. Gramsci lahir di Italia 22 Januari 1819, dan meninggal dunia 27 April 1937. Beberapa karyanya kini banyak di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

[16] Nezar Patria dan Andi Arief. *Antonio Gramsci Negara & Hegemoni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teori hegemoni dipergunakan untuk melihat bagaimana hegemoni dipraktikkan oleh siapa saja dalam rangka mencapai tujuan masing-masing. Bagi pemerintah daerah, hegemoni dipraktikkan dalam upaya merebut pengaruh masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa Gramsci membangun teorinya dengan menekankan ada penerimaan kelompok yang didominasi terhadap kehadiran kelompok dominan yang berlangsung dalam suatu proses damai, tanpa adanya kekerasan.[17]

Praktik hegemoni bukan tidak bisa dicegah. Secara teoretis, Gramsci memberi solusi untuk melawan hegemoni dengan hegemoni (*counter hegemony*) yang menitikberatkan pada sektor pendidikan. Kaum Intelektual, memegang peranan penting di masyarakat. Bagi Gramsci, ada dua tipe Intelektual yang ada dalam masyarakat. *Pertama*, intelektual tradisional dimana intelektual ini terlihat independen, otonom serta menjauhkan diri dari kehidupan masyarakat. Mereka hanya mengamati serta menjalani kehidupan masyarakat dari kejauhan juga seringkali bersifat konservatif serta anti terhadap perubahan. *Kedua*, intelektual organik, mereka merupakan orang yang sebenarnya menanamkan ide, menjadi bagian dari penyebaran ide-ide yang ada di masyarakat dari kelas yang berkuasa, serta turut aktif dalam pembentukan masyarakat yang diinginkan. Praktisnya, kaum intelektual organik haruslah berangkat dari kenyataan yang ada di masyarakat. Mereka haruslah orang yang berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat, menanamkan kesadaran baru yang menyingkap kebobrokan sistem lama serta dapat mengorganisir masyarakat. Hegemoni pada dasarnya

[17] Eriyanto, *Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: LkiS, 2001),103-105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menekankan pengaruh untuk mempengaruhi kesadaran dan persetujuan masyarakat.

Melalui pendidikan, negara dan pemangku kebijakan dapat menjalankan kepentingannya. Dalam hal ini hegemoni berarti cara elit politik memperoleh keunggulan atau supremasi melalui kepemimpinan intelektual dan moral. Tujuan dari adanya hegemoni adalah menarik perhatian masyarakat atau mengarahkan pada hal-hal yang difokuskan oleh sang penghegemoni.[18] Di sini terjadinya konsensus bukan karena kelas yang terhegemoni menganggap struktur sosial yang ada itu sebagai keinginan mereka, tetapi bagian dari konstruksi dalam bentuk hegemoni.

2. Teori Kekuasaan

Teori lain dalam penelitian ini adalah teori kekuasaan dari Michel Foucault, untuk menyingkap tabir relasi kuasa (kiai pesantren dan pejabat publik) dan pendidikan. Bagi Foucault, kekuasaan tidak pernah lepas dari pengetahuan. Kekuasaan dan pengetahuan saling terkait. Tidak ada hubungan kekuasaan tanpa pembentukan yang tekait dengan bidang pengetahuan dan tidak ada pengetahuan yang tidak mengandaikan serta tidak membentuk sekaligus berhubungan dengan kekuasaan.[19]

Terdapat beberapa indikasi keterkaitan antara keduanya seperti peran bahasa. Bagi Foucault, bahasa menjadi sarana dalam mengartikulasikan kekuasaan. Gagasan ini sejalan dengan pandangan Habermas yang melihat bahasa

---

[18] Nezar Patria dan Andi Arief. *Antonio Gramsci Negara & Hegemoni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 157.

[19] Haryatmoko, Etika *Politik dan Kekuasaan* (Jakarta: Kompas Midia Nusantara Budaya,2014). 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan hanya sebagai alat komunikasi tetapi memiliki *powerfully propaganda* dan wacana. Dalam lain bahasa, dengan menerapkan teori *emansipatoris,* Habermas mengemukakan bahwa kekuasaan dan politik turut menunjukkan pola komunikatif, diskursif, kritis dalam kehidupan sosial.[20] Kekuasaan menurut Foucault adalah bukan milik siapa pun dan kekuasaan ada di mana-mana serta kekuasaan merupakan strategi. Kekuasaan adalah praktik yang terjadi dalam suatu ruang lingkup tertentu karena ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu dengan yang lain dan senantiasa mengalami pergeseran. Kekuasaan menentukan susunan, aturan dan hubungan dari dalam. Kekuasaan bertautan dengan pengetahuan yang berasal dari relasi-relasi kekuasaan yang menandai subjek.

3. Teori Kebijakan Publik

Dalam aspek kebijakan publik, penelitian ini juga menggunakan teori kebijakan publik sebagai telaah teoritik untuk mengalisis aspek penentuan kebijakan pendidikan. Sebagaimana diketahui, pendidikan Islam dalam struktur pendidikan nasional sebagai bagian integral. Secara yuridis, pendidikan telah diamanatkan untuk dikelola oleh negara.

Definisi kebijakan publik dalam pandangan William N. Dunn, merupakan suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan serta disusun oleh institusi atau pejabat pemerintah.[21] Sedangkan pandangan Thomas R. Dye penulis buku "*Understanding Public Policy*" menjelaskan bahwa "*public policy is whatever governments choose to do or not to do"* (kebijakan publik adalah

[20] Haryatmoko, Etika *Politik dan Kekuasaan* (Jakarta: Kompas Midia Nusantara Budaya,2014)., 248.
[21] William N. Dunn. *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2002).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan).[22] Sementara Anderson dalam buku "*Public Policy-Making*" mengutarakan lebih spesifik bahwa: "*public policies are those policies developed by government bodies and official"* (kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga dan pejabat pemerintah).[23]Teori kebijakan publik digunakan untuk menganalisis tentang isi kebijakan publik serta persoalan-persoalan yang terkait dengan penentuan kebijakan pendidikan di Bangkalan, seperti yang diungkapkan oleh Mudjia Rahardjo, tentang bagaimana, mengapa, dan apa pengaruh yang timbul dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah. Juga kajian tentang apa yang dilakukan pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan perbedaan-perbedaan apa yang timbul. Selain itu, juga tentang sifat dasar, sebab-sebab, dan akibat kebijakan publik.[24]

Dari uraian di atas, peneliti berupaya menggunakan ketiga teori tersebut, diantaranya: teori hegemoni, teori kekuasaan dan teori kebijakan untuk mengkaji serta menganalisis partisipasi kiai pesantren dalam penentuan kebijakan pendidikan, terutama dalam penentuan kebijakan pendidikan di Bangkalan khususnya kebijakan pendidikan Islam.

G. Penelitian Terdahulu

Sejauh peneliti ketahui, selama ini belum ditemukan penelitian yang mengulas khusus persoalaan partisipasi kiai pesantren dalam penentuan kebijakan pendidikan, terutama di Kabupatan Bangkalan Madura. Dalam pencarian jenis

---

[22] Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy* (Singapore: Lougman,2001).
[23] James E. Anderson, *Public Policy Making: An Introduction* (Boston: Houghton Mifflin Company, 1998).
[24] Mudjia Raharjo. *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press,2010), 5-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian yang relevan dengan persoalan tersebut, peneliti menemukan beberapa titik kesamaan dengan beberapa penelitian yang telah terlebih dahulu dilakukan, antara lain yaitu:

1. Penelitian oleh Chairul Mahfud, disertasi dengan judul *Politik Pendidikan Islam di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pasca Orde Baru)*. Penelitian ini memiliki fokus sekitar produk, implementasi dan dampak kebijakan kurikulum, anggaran, kelembagaan, serta guru agama Islam dari pemerintah setelah runtuhnya Orde Baru (1998). Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pemerintah pasca Orde Baru menghasilkan kebijakan terkait dengan pendidikan Islam antara lain: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentag Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan lainnya. Terkait dengan pelaksanaan politik pendidikan Islam di Indonesia, penelitian ini menghasilkan klasifikasi tipologi kebijakan yaitu: tipologi kebijakan adaptif, akomodatif, diskriminatif dan integratif.[25]

[25] Choirul Mahfud, *Politik Pendidikan Islam di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pasca Orde Baru)* (Surabaya: Disertasi UIN Sunan Ampel, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penelitian oleh Achmad Patoni, disertasi yang telah dibukukan dengan judul *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa kiai pesantren tidak terlepas dari dunia politik. Dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa peran kiai mempunyai peran ganda yaitu: *pertama*, dalam bidang agama dan *kedua,* memberi indikasi bahwa bagaimana kiai pesantren ikut dalam kancah politik.[26]
3. Penelitian oleh Imam Suprayogo, disertasi yang telah dibukukan dengan judul *Kiai dan Politik; Membaca Citra Politik Kiai*. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa banyak dari tipologi kiai yang terlibat dalam politik bahkan ada yang terjun langsung menjadi politisi. Dalam penelitian ini ada anggapan dari masyarakat apakah kiai pantas atau tidak terlibat langsung dalam dunia politik mengingat bidang keilmuan yang dimiliki lebih bernuansa keagamaan, sehingga dianggap cukup mengurusi umat di bidang keagamaan.[27]
4. Penelitian oleh Zamaksari Dhofier, disertasi yang telah dibukukan dengan judul *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*. Penelitian ini dilakukan di pesantren Tegal Sari dan Tebuireng. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa terjadi perubahan sosial dalam pesantren walaupun tidak mengubah akar substansial dari pesantren sendiri. Dalam hal politik Dhofier mengatakan bahwa politik pesantren merupakan *Relegius Power*, artinya partisipasinya hanya sesuatu untuk kepentingan dakwah dan untuk pelestarian

[26] Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
[27] Imam Suprayogo, *Kiai dan Politik: Membaca Citra Politik Kiai* (Malang: UIN-Malang Press, 2007).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam dalam masyarakat. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa politik utama NU bukanlah politik yang berorientasi pada kekuasaan atau sumber material.[28]

5. Penelitian oleh Zainuddin Syarif, dengan judul *Dinamika Politik Kiai dan Santri dalam Pilkada Pamekasan,* dalam penelitian ini disebutkan bahwa *pertama*, formula politik kiai yang digunakan dalam mempertahankan otoritas kepemimpinannya terhadap santri bertumpu pada dua kekuatan yaitu: *Traditional* dan *Charismatic Domination*, artinya kiai tetap mempertahankan pesona sebagai sosok kharismatik religius melalui simbol-simbol kepatuhan yang dibingkai dalam moral agama dalam mempertahankan pergeseran dari kepatuhan politik keperbedaan politik walaupun hal itu dilakukan sebatas santri alumni. Dari perilaku politik santri tersebut ditemukan ada tiga tipologi politik santri yaitu: *Pertama,* santri patuh mutlak. *Kedua*, santri patuh semu. *Ketiga*, santri prismatik.[29]

6. Penelitian oleh Ali Maschan Moesa, sebuah disertasi yang sudah dibukukan dengan judul *Nasiolalisme Kiai, Konstruksisoial Berbasis Agama,* dalam penelitian ini menjabarkan *Pertama,* nasiolalisme dalam pemahaman kiai. *Kedua,* negara dalam konstruksi kiai. *Ketiga,* tentang perkembangan nasionalisme Indonisia dalam konstruksi para kiai. *Keempat,* konstruksi kiai tentang nasionalisme yang dibagi menjadi tiga tipologi diantaranya: kiai *fundamentalis*, kiai *moderat* dan kiai *pragmatis*, dalam kajian ini banyak pihak menilai bahwa agama bertentangan dengan nasionalisme, dan bahkan menganggap faktor perusak keutuhan sebuah bangsa, akan tetapi dalam

[28] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011)
[29] Zainuddin Syarif, "*Dinamika Politik Kiai Dan Santri Dalam Pilkada Pamekasan*".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini menemukan bukti yang berbeda, agama ternyata bisa menjadi faktor perekat bangsa dan sekaligus menjadi basis ikatan solidaritas sosial yang kuat antar warga.

7. Penelitian oleh Mohammad Muchlis Solichin, dengan judul *Kepemimpinan Kiai dalam Mobilisasi Kekuasaan Politik Umat (Studi Kasus Peran Kepemimpinan Kiai dalam Mobilisasi Kekuatan Umat Islam di Kabupaten Pamekasan pada Masa Reformasi),* dalam penelitian ini dijelaskan bahwa para kiai di Pamekasan terlibat dalam politik, dengan adanya pembentukan suatu ikatan yang kuat diantara mereka dengan kerabat, santri dan pengikut mereka yang mempunyai berbagai kesamaan seperti kesamaan guru/almamater, visi politik serta visi paham keagamaan. Ikatan inilah yang nantinya melahirkan dua kubu politik besar di Pamekasan, yaitu PKB dan PPP yang keduanya sangat mendominasi perpolitikan di Kabupaten Pamekasan. Hal ini dikarenakan kedua partai ini didukung oleh kelompok kiai yang mempunyai pengaruh yang sangat luas di masyarakat.[30]
8. Penelitian oleh M. Sirozi, di Monash University, Melbourne Australia, dengan judul *"Politics of Educational Policy Production of Indonesia: A Case Study of The Roles of Muslim Leaders in the Establisment of Number 2 Act of 1989*. Pada tahun 2004 disertasi ini diterbitkan dengan judul Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-Tokoh Islam dalam Penyusunan UU. No. 2 Tahun 1989. Dalam penelitian tersebut diperoleh temuan bahwa diakuinya sistem pendidikan Islam – MI disederajatkan

[30] Mohammad Muchlis Solichin, "*Kepemimpinan Kiai dalam Mobilisasi Kekuasaan Politik Umat* (Studi Kasus Peran Kepemimpinan Kiai dalam Mobilisasi Kekuatan Umat Islam di Kabupaten Pamekasan pada Masa Reformasi)" (Tesis--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan SD, MTs disederajatkan dengan SMP dan MA disederajatkan dengan SMA - dalam UU. Nomor 2 Tahun 1989 tidak terlepas dari peran para tokoh-tokoh muslim yang terlibat dalam pemerintahan, poltik, akademisi dan para ulama pesantren. Atas kontribusi para cendekiawan muslim inilah kemudian kebijakan tersebut bernilai positif terhadap pendidikan Islam.[31]

9. Penelitan oleh Endang Turmudi, *Perselingkuan Kiai dan Kekuasaan*. penelitian ini menjabarkan bagaimana kronologi di balik wacana pergeseran peran kiai sehingga ia masuk dalam jajaran politik dan bergabung dalam kekuasaan. Selain itu kontribusi penelitian ini memberikan semacam masukan bahwa pembentukan partai politik Islam jelas dibentuk untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingan politik umat sehingga pada perkembangannya ada semacam signifikasi perubahan posisi politik kiai dengan munculnya perubahan dalam etos umat Islam Indonesia. Perubahan etos ini ditandai dengan putusnya hubungan Islam dan politik sehingga karena politik dalam pengertian ini tidak lagi terkait dengan Islam maka tidak ada lagi kewajiban moral seorang muslim untuk bergabung dengan partai politik tertentu. Justru berbekal pandangan inilah pembaca akhirnya dapat menarik kesimpulan sendiri apakah benar peran kiai yang terjun dalam politik memang disebabkan adanya paradigma yang menguatkan para kiai itu sendiri untuk berpolitik dengan caranya sendiri, atau memang perannya sudah dibentuk sebagai salah satu kekuatan politik guna menggalang kekuatan baru.[32]

---

[31] M. Sirozi, *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
[32] Endang Turmudi, *Perselingkuan Kiai dan Kekuasaan* (Yogyakarta: Lkis, 2003).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Penelitian oleh Muh Saerozi, dengan judul *Politik Pendidikan Agama Dalam Era Pluralisme Telaah Historis atas Kebijaksanaan Pendidikan Agama Konfesional di Indonesia*. (Yogyakarta: Pascasarjana IAIN Sunan Kalijogo, 2003). Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pola pendidikan agama yang sedang berlangsung di Indonesia, menemukan akar historisnya dan menemukan rumusan teoretik pendidikan agama yang relevan dengan realitas kemajemukan. Masalah pokok dalam penelitian ini bukan lagi mencari akar keberadaan pendidikan agama di Indonesia, tetapi mencari akar historis pendidikan agamanya. Perbedaan lainnya terletak pada upaya untuk memetakan kebijaksanaan pendidikan agama pada tiap-tiap penguasa kolonial di Nusantara. [33]
11. Penelitian oleh Mohammad Thoha, dengan judul *Politik Pendidikan Islam Potret Sejarah Periode Klasik sampai Abad Pertengahan*, (Pamekasan: Jurnal Tarbiyah Tadris, 2013). Politik dan pendidikan senantiasa berjalan bersama. Keduanya tidak bisa dipisahkan meskipun keduanya telah nyata memiliki nilai dan semangat yang berbeda. Politik senantiasa berkepentingan untuk melanggengkan kekuasaan, sementara pendidikan berkepentingan melestarikan nilai-nilai suci peradaban dan budaya umat manusia. Perjalanan sejarah telah memotret berkelindannya pergumulan politik dan pendidikan dalam membangun masa-masa keemasan peradaban Islam. Berangkat dari nuansa kontestasi politik dengan dunia Barat, para praktisi pendidikan Islam telah berhasil membendung upaya Barat, para praktisi senantiasa

[33] Muh Saerozi, *Politik Pendidikan Agama Dalam Era Pluralisme Telaah Historis atas Kebijaksanaan Pendidikan Agama Konfesional di Indonesia*, (Yogyakarta: Pascasarjana IAIN Sunan Kalijogo, 2003).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendiskreditkan Islam dalam pentas peradaban dunia. Tulisan ini mencoba memotret relasi kekuasaan (politik) dengan perjalanan dunia pendidikan pada masa-masa awal kejayaan Islam (klasik) hingga menjelang abad pertengahan.[34]

12. Penelitian oleh Mukhlishi, dengan judul *Pesantren dan Politik Pendidikan:* Relasi *Elite Pesantren dengan Pemangku Kebijakan Pendidikan di Sumenep*. Temuan yang berkaitan tentang relasi elite pesantren mempunyai modal awal, baik dalam relasi dengan santri atau pemangku kebijakan di Kabupaten Sumenep. Terdapat tiga tipologi relasi elite kebijakan pendidikan di Sumenep, yakni posisi kunci, seperti pihak eksekutif dan legislatif dan dinas pendidikan. Posisi primer, yaitu mereka yang memiliki relasi kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan. Posisi sekunder, mereka yang tidak memiliki kepentingan langsung dengan suatu kebijakan, namun memiliki kepedulian dan perhatian jelas terhadap legal Pemerintah.[35]

Mukhlishi mengungkapkan bahwa respon masyarakat tentang kebijakan pendidikan di Kabupaten Sumenep terjadi pro-kontra, sebagian setuju mengharap agar Sumenep tetap dipimpin oleh tokoh elite pesantren dari pada dipimpin oleh orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya serta tidak berpihak pada pendidikan pesantren. Sementara di pihak yang kontra mengharap agar kiai kembali pada pesantren, jangan sampai semua kiai pesantren menjadi pemangku kebijakan, karena harus ada tokoh yang tetap eksis mengelola pesantren.

---

[34] Mohammad Thoha, *Politik Pendidikan Islam Potret Sejarah Periode Klasik Sampai Abad Pertengahan,* (Pamekasan: Jurnal Tarbiyah Tadris, 2013).

[35] Mukhlishi, *Pesantren dan Politik Pendidikan: Relasi Elite Pesantren dengan Pemangku Kebijakan Pendidikan di Sumenep*, (Surabaya, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada poin inilah perlu adanya penegasan kembali mengenai urgensi penelitian yang menjadi pembeda dengan fokus penelitian yang saat ini peneliti lakukan yakni mengenai partisipasi kiai pesantren dalam penentuan kebijakan pendidikan. Selain itu juga, objek penelitian pun secara demografis dan corak sosial-politik juga berbeda, meskipun masih satu wilayah di daerah Madura sementara peneliti mengambil setting tempat di Kabupaten Bangkalan.

Beberapa penelitian terdahulu yang peneliti uraikan semakin menguatkan tesis, bahwa sosok kiai cukup signifikan berpartisipasi dalam berbagai kebijakan, khususnya dalam penentuan kebijakan pendidikan di lingkup daerah masing-masing, sekaligus menandakan bahwa kiai merupakan figur sentral-potensial dalam setiap pengambilan kebijakan dan tentunya tidak menutup kemungkinan terjadi pula dalam kebijakan di bidang pendidikan di Bangkalan.

Meskipun secara khusus penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas tidak fokus mengkaji persoalan penentuan kebijakan pendidikan, namun tetap secara substansi dalam beberapa data akan peneliti manfaatkan untuk mempertajam analisis terhadap bentuk-bentuk partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan pendidikan di setiap satuan daerah masing-masing, khususnya di daerah Bangkalan Madura. Sehingga penelitian ini diharapkan memberi data baru dan memunculkan teori baru.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau prosedur sistematik dan terorganisir yang dipergunakan untuk melakukan penelitian, sehingga mampu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.[36] Dalam penelitian ini, ada beberapa hal metodologis yang diutamakan dan menjadi fokus perhatian dalam proses penelitian yang dilakukan. Di antaranya adalah:

1. Lokasi Penelitian

Peneliti tertarik untuk mengkaji tentang Madura yang dikhususkan di Kabupaten Bangkalan, Pemilihan lokasi di Bangkalan Madura bukan tidak beralasan, Bangkalan merupakan daerah di mana memiliki kultur yang sangat religius dan banyak berdiri pondok pesantren yang semuanya masih taat dan hormat kepada Bani Kholil, kiai di Bangkalan merupakan figur yang disegani, sehingga menjadikan kiai terutama keturunan Bani Kholil satu tingkat di bawah tuhan.

Penghormatan masyarakat kepada seorang kiai sangat luar biasa yang tidak ditemui di daerah selain Madura. Latar belakang itu yang menjadikan peneliti memutuskan pilihan di Bangkalan terkait partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan pendidikan yang terfokus pada kebijakan pendidikan Islam.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan pendidikan ini, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif.[37] Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif merupakan fokus perhatian dengan beragam

---

[36] Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Erlangga, 1999*)*, 23.

[37] Menurut Anselm Strauss & Juliet Corbin penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik maupun bentuk hitungan lainnya. Lihat Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Basic of qualitative Research, Grounded Theory Procedures and Techniques,* terj. M. Shodiq (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

metode yang mencakup pendekatan interpretatif naturalistik terhadap subjek kajiannya.[38]

Denzin dan Lincoln menambahkan bahwa para peneliti kualitatif mempelajari benda-benda di dalam konteks alaminya, yang berupaya untuk memahami, atau menafsirkan, fenomena dilihat dari sisi makna yang dilekatkan manusia (peneliti) kepadanya.[39] Argumentasinya, data yang dikumpulkan cenderung lebih banyak data kualitatif dibandingkan data kuantitatif, karena data disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.[40] Hal ini sejalan dengan penjelasan Taylor dan Bogdan yang menyatakan bahwa "*qualitative methodologies refer to research procedures which produce descriptive data: people's own written or spoken words and observale behavior*".[41]

Lexi J. Moleong berpendapat bahwa penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[42] Penggunaan metode penelitian kualitatif bisa dengan beberapa metode, di antaranya: metode pengamatan, wawancara dan telaah dokumen.[43] Sejalan dengan itu para peneliti kualitatif menerapkan aneka yang saling berkaitan, dengan

---

[38] Norman K. Denzin dan Yvonna S., "Pendahuluan: Memasuki Bidang Penelitian Kualitatif" dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, Penerj. Dariyatno dkk. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 2.
[39] Norman K. Denzin dan Yvonna S., "Pendahuluan: Memasuki Bidang Penelitian Kualitatif.
[40] Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 29.
[41] J. Taylor dan Steven Bogdan, *Introduction to Qualitative Research Methods: The Search for Meaning* (New York: John Wiley dan son Inc., 1984), 5.
[42] Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 6.
[43] Ibid. 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selalu berharap untuk mendaptkan hasil yang lebih baik mengenai subjek kajian yang dihadapi.[44]

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang berupa wawancara kepada sejumlah kiai pesantren dan pejabat publik sebagai stakeholders kebijakan pendidikan di Bangkalan, secara langsung. Selain itu, didukung dengan metode dokumentasi sebagai pengumpulan data,[45] sehingga penelitian ini cenderung memiliki karakteristik antara lain: Bersifat deskriptif analisis dan cenderung menganalisis data secara deduktif serta berupaya mencari makna (*meaning*) yang sangat esensial dalam penelitian ini.[46]

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengurai persoalan partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan pendidikan di Bangkalan. Selain itu, penelitian ini juga memakai teori kebijakan dari William N. Dunn. Yulizar Kasih mengutip pandangan William N. Dunn, analisis kebijakan publik dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan empiris, evaluatif dan normatif.[47]

Pendekatan empiris, berarti bahwa dalam penelitian ini lebih menekankan pada analisis sebab atau akibat dari suatu kegiatan publik, dan informasi yang dihasilkan bersifat deskriptif. Pendekatan evaluatif lebih menekankan pada penilaian atau evaluasi manfaat kebijakan terhadap suatu

---

[44] Norman K. Denzin dan Yvonna S., "Pendahuluan: Memasuki Bidang Penelitian Kualitatif" dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, Penerj. Dariyatno dkk...., 2.
[45] Robert C. Bogdan and Sari Knoop Biklen, *Qualitative Research of Education; An Introduction to Theory and Method* (Boston: Allyn Bacon, 1992), 2.
[46] David Halpin dan Barry Troyna, *Researching Education Policy: Ethical and Methodological Issues* (London: The Falmer Press, 1994), 200-215.
[47] William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2000).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. Sedangkan pendekatan normatif menekankan pada rekomendasi tindakan-tindakan yang dapat menyelasaikan masalah publik.[48]

3. Sumber Data dan Informasi.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data dan imformasi adalah kiai pesantren di wilayah kabupaten yang selalu berpartisipasi dan diikut sertakan dalam penentuan kebijakan terutama dalam penentuan kebijakan pendidikan, dan juga pejabat publik sebagi pemangku kebijakan di Bangkalan. Pengumpulan sumber data dan informasi dalam penelitian ini dilakukan melalui studi wawancara yang mendalam kepada kiai pesantren dan pejabat publik, serta dokumentasi terhadap bahan pustaka yang sesuai dengan objek penelitian. Seperti ucapan, tindakan mengenai data primer juga beberapa bahan dikumpulkan melalui penggunaan teknik dokumentasi dari berbagai media dan informan. Survei dokumen dimaksudkan terutama untuk menemukan kode-kode spesifik, publikasi dan isu-isu utama serta polemik-polemik dari isu ke isu yang lain berikutnya atau pada kebijakan tertentu dalam dilakukan terutama lewat pembacaan sejumlah data dan fakta dari berbagai rujukan buku, jurnal, arsip dan sumber relevan lain yang terkait partisipasi kiai pesantren dalam penetuan kebijakan pendidikan di Bangkalan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan revelan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya: Wawancara dan dokumentasi.

---

[48] William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2000).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Metode Wawancara

Dalam penelitian ini proses memperoleh keterangan atau informasi dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan kiai pesantren dan pejabat publik di Bangkalan. Dilakukan dengan menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Inti dari metode wawancara yang selalu ada yang digunakan peneliti adalah:

1) Peneliti menggunakan metode wawancara sekaligus bertindak sebagai pemimpin dalam proses wawancara tersebut.
2) Responden merupakan orang yang diwawancarai disini adalah kiai pesantren dan pejabat publik, diminta informasi oleh peneliti.
3) Materi wawancara adalah persoalan yang ditanyakan kepada kiai pesantren dan pejabat publik, terkait partisipasi kiai pesantren dalam penentuan kebijakan pendidikan di Bangkalan.
4) Pedoman wawancara adalah instrumen yang digunakan untuk memandu jalannya wawancara.[49]

Sedangkan bentuk wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara sistematik (terstruktur), wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu peneliti mempersiapkan pedoman (*guide*) tertulis tentang partisipasi kiai pesantren dalam penentuan kebijakan pendidikan di Bangkalan, agar mengarahkan membimbing alur wawancara terutama mengarah tentang partisipasi kiai pesantren dalam penentuan kebijakan pendidikan. Juga dapat menghindari kemungkinan melupakan beberapa persoalan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Serta meningkatkan kredibilitas penelitian, dapat meyakinkan orang lain (kiai dan pejabat publik) tentang apa yang dilakukannya, karena dapat dipertanggung jawabkan secara tertulis.[50]

---

[49] Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 136.
[50]Ibid., 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam melakukan wawancara, peneliti membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, dan direkam menggunakan alat bantu agar peneliti tidak kesulitan dalam mengingat sehingga pelaksanaan wawancara berjalan lancar.[51]

b. Metode Dokumenter

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah data sekunder yang disimpan dalam bentuk dokumen atau file (catatan konvensional maupun elektronik).[52] Seperti diantaranya : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Bangkalan Bidang Pendidikan, Peraturan Daerah (PERDA) Bangakalan, Peraturan Bupati (PERBUB) Bangkalan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bangkalan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) Bangakalan, serta dokumen lainnya yang terkait dengan perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Bangkalan.

5. Teknik Analisis Data

Dari data yang sudah diperoleh langkah selanjutnya peneliti menganalisis data, pada dasarnya peneliti sudah melakukan sejak awal kegiatan penelitian sampai akhir penelitian. Dengan cara ini diharapkan terdapat konsistensi analisis data secara keseluruhan dalam studi analisis kebijakan publik terkait partisipasi kiai pesantren dalam penentuan kebijakan pendidikan di Bangkalan. Penelitian ini juga bisa dianalisis dengan menggunakan tawaran dari tiga metode analisis

[51] Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Prenada Media Group), 2011., 138.
[52] Puguh Suharso. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis* (Jakarta: PT Indeks, 2009), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan publik yang dikembangkan oleh William N. Dunn, yaitu analisis kebijakan prospektif, retrospektif, dan integratif.[53]

Secara praktis, Data yang diperoleh dari berbagai sumber dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh (dapat disimpulkan). Pengamatan yang terus-menerus menghasilkan variasi data yang tinggi. Oleh karena itu, sering mengalami kesulitan dalam proses menganalisisnya. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan maka selanjutnya mencari data lagi secara terus-menerus agar dapat digeneralisasikan apakah hipotesis diterima atau ditolak berdasarkan data valid yang telah terkumpul. Ketika hipotesis diterima berdasarkan data yang terkumpul maka hipotesis dapat berkembang menjadi teori. Menurut Sugiyono, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

a. Analisis Sebelum di Lapangan

Peneliti telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian yaitu: partisipasi kiai dalam penentuan kebijkan pendidikan di Bangkalan.

---

[53] William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarrta: Gajah mada Universiti perss,2005), 117-125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Analisis selama di lapangan Model Miles dan Huberman

Analisis data dalam penelitian ini, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban kiai pesantren dan pejabat publik di Bangkalan. Bila jawaban mereka setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

Tahapan dalam analisis data dalam penelitian ini megunakakan Miles and Huberman, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.[54]

1) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting terkait partisipasi kiai pesantren dalam penentuan kebijakan, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang partisipasi kiai pesantren dalam penentuan kebijakan pendidikan di Bangkalan, dan

[54] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, Cet. VII, 2009), 336 – 337.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2) *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, selanjutnya peneliti menyajikan data. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif dari catatan lapangan. Penyajian data adalah tahapan untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tujuannya untuk dianalisis dan diambil tindakan yang dianggap perlu.

3) Conclusion Drawing/verification

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, Dalam konteks ini, beberapa data menjadi obyek analisis tentang partisipasi kiai pesantren dalam penentuan kebijakan pendidikan, di antaranya berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan, Peraturan Bupati (PERBUB) Bangkalan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bangkalan, (MUSREMBANG) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bangkalan serta dokumen lainnya yang terkait dengan perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Dengan demikian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesimpulan dalam penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.[55]

6. Uji Keabsahan Data

Kriteria kredibilitas melibatkan penetapan hasil penelitian ini adalah kredibel atau dapat dipercaya. strategi untuk meningkatkan kredibilitas data meliputi berikut ini, yaitu memperpanjangan pengamatan, ketekunan penelitian, serta triangulasi.

a. Memperpanjang Pengamatan

Memperpanjang masa pengamatan memungkinkan memperbanyak data lagi yang ditemukan karena peneliti kembali lagi ke lapangan. Selain itu, peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, bisa mempelajari kebudayaan dan dapat menguji informasi informan meliputi kiai pesantren dan pejabat publik di Bangkalan, serta untuk membangun kepercayaan para kiai pesantren dan pejabat publik di Bangkalan terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.

b. Ketekunan Penelitian

Peneliti tekun dalam melakukan penelitian, sehingga penggalian data tersebut dilakukan dengan cermat dan berkesinambungan. Pengalian data yang terus menerus, untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan pendidikan, serta memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. sehingga kredibilitas data dapat meningkat dan dipercaya oleh publik.

---

[55] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, Cet. VII, 2009), 336-337.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Triangulasi

Pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Oleh karena itu, triangulasi ada yang disebut dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data peneliti melakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang di antaranya data dari Badan Penyelenggaraan Daerah, Dinas Pendidikan, Kementrian Agama yang dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari sumber-sumber itu, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif. Setelah menghasilkan kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan sumber-sumber data tersebut.

2) Triangulasi Teknik

Peneliti Mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu data diperoleh dengan wawancara kepada kiai pesantren dan pejabat publik, lalu dicek dengan dokumentasi seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan sebagainya, jika menghasilkan data yang berbeda-beda, bisa jadi semuanya benar, karena sudut pandang yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang bersangkutan atau yang lain, unutuk memastikan data mana yang dianggap benar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data maupun sesudahnya.[56] Analisis tersebut dimulai dengan tahap teorisasi, analisis induktif, analisis tipologis, dan tahap interpretasi. Sementara pada optik analisis Michael Hill, analisis tentang kebijakan (*analysis of policy*) dilakukan dengan cara analisis isi dari produk kebijakan politik tentang partisipasi kiai pesantren dalam penentuan kebijakan pendidikan.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyelesaian penelitian ini, peneliti merencanakan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab yang meliputi:

Bab pertama pendahuluan, meliputi: Latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tinjuan umum partisipasi kiai pesantren dan kebijakan pendidikan. Membahas tentang tinjauan umum Partisipasi meliputi: Definisi partisipasi prinsip-prinsip partisipasi, bentuk dan tipe partisipasi, faktor-faktor partisipasi, macam-macam partisipasi, tahapan dan tingkatan partisipasi. Tinjauan tentang kiai dan pesantren meliputi: Definisi, tipologi, fungsi dan tugas kiai, partisipasi kiai dalam dunia politik, definisi dan elemin pesantren, metode pembelajaran dan dinamika perkembaagan dunia pesantren. Serta tinjauan tentang kebijakan publik meliputi: Definisi kebijakan publik, statekholder kebijakan publik, analisis kebijakan publik, implemintasi kebijakan publik, partisipasi

[56] Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat dalam kebijakan publik, partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik dan partisipasi kiai pesantren dalam penentuan kebijakan pendidikan di Indonesia.

Bab ketiga gambaran umum Kabupaten Bangkalan meliputi: Geografis, sosial, pendidikan, sosial budaya masyarakat Bangkalan dan sejarah pemerintahan Bangkalan.

Bab keempat partisipasi kiai pesantren dalam Penentuan kebajakan pendidikan dalam bab ini menguraikan dan menganalisis secara jelas tentang tiga hal yaitu: *Pertama* bagimana bentuk relasi kuasa kiai pesantren dan pejabat publik di Bangkalan, *kedua* bagimana bentuk partisipasi kiai pesantren dalam penentuan kebijakan pendidikan di Bangkalan, *ketiga* bagaimana implikasi partisipasi kiai pesantren dalam penentuan kebijakan pendidikan terhadap pidindikan Islam di Bangkalan.

Bab kelima Penutup, meliputi: Kesimpulan, implikasi teoretik, keterbatasan penelitian dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id